

PRO DAN KONTRA DALAM PEMBERITAAN RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM ARTIKEL MAJALAH *AL-WA'IE* (Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough)

Yuliarni
Padjadjaran University, Bandung
krasibayajewuska28@yahoo.com

Abstract

Pros and cons of antipornography and pornaction bill (*RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi* or APP for short) became a hot issue in 2006. News about APP bill highlighted it in both printed and electronic media. *Al-wa'ie Magazine* is one of Islamic magazines which so intensely reported this problem. To uncover the ideological picture conveyed in the articles published in the magazine and social dimensions influencing the society, the author used a model of critical discourse analysis of Norman Fairclough. This couldn't be separated from Islamic ideology which is used by *Al-wa'ie Magazine* as *daqwa'* media for one of Islamic organizations (Hisbut Tahrir Indonesia).

Pro dan kontra Ruu anti pornografi dan pornoaksi ini menjadi masalah yang hangat di tahun 2006. Pemberitaan tentang RUU APP jadi sorotan baik di media cetak maupun media elektronik saat itu. Majalah *Al-wa'ie* adalah salah satu dari majalah Islam yang intensif memberitakan permasalahan ini. Untuk mengungkap gambaran ideologi yang terdapat dalam artikel yang dimuat di majalah *Al-wa'ie* dan pengaruh dimensi sosialnya di masyarakat, penulis menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Hal ini tidak lepas dari ideologi Islam yang dianut Majalah *Al-wa'ie* sebagai media dakwah bagi salah satu organisasi Islam (HTI)

Keywords : Antipornography and Pornaction Bill, *Al-wa'ie*, news, model of critical discourse analysis of Norman Fairclough

PENDAHULUAN

Pemberitaan masalah seputar pro dan kontra RUU Antipornografi dan Pornoaksi (atau APP) terlihat menjadi sorotan di tengah masyarakat di awal tahun 2006. Untuk sekian kalinya suara mayoritas dikalahkan oleh minoritas. Di Indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam, tetapi itu tidak dapat membuat RUU APP lancar tanpa hambatan sampai disahkan menjadi Undang-Undang di negeri ini. Di

samping pernyataan dukungan, suara penolakan pun tidak kalah banyak terdengar ke permukaan. Oleh karena itu, berbagai alasan dikemukakan. Majalah *Al-wa'ie* sebagai salah satu majalah Islam sangat aktif menyoroti hal tersebut.

Sebagai salah satu media yang diterbitkan oleh kaum muslim, majalah *Al-wa'ie* memberitakan dukungannya terhadap RUU APP walaupun media yang lain banyak menolak dengan adanya RUU APP di negeri ini. Dengan menggunakan analisis Norman Fairclough, penulis mencoba mengungkap alasan-alasan dan ideologi yang dianut media ini serta gambaran ideologi yang ditampilkan dalam pemberitaannya lewat teks-teks yang ditulis dalam artikel yang dimuat di majalah *Al-wa'ie* ini.

Saat ini bahasa bukan hanya sekadar media utama dalam berkomunikasi. Fairclough (1989:2-4) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, pelaksanaan kuasa semakin meningkat dicapai melalui ideologi yang secara khusus dilakukan melalui peran-taraan bahasa. Titik fokus perhatian Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu, diperlukan analisis yang menyeluruh karena bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial (Fairclough 1995b:33 – 34; 2003:2 – 3). Oleh karena itu, Fairclough menganggap bahwa kajian bahasa tidak lagi seharusnya difokuskan hanya pada kajian-kajian struktur yang melepaskan bahasa dari dunia sosialnya. Kajian bahasa harus mulai ditingkatkan/dilanjutkan pada kajian-kajian yang bersifat memahami proses sosial (*social process*) yang terdapat di dalam bahasa, seperti dominasi, hegemoni, ideologi, yang diperjuangkan, dilangsungkan, disalurkan, dipertahankan, bahkan diinstitusikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Fairclough menawarkan model analisis wacana kritis yang lebih dikenal dengan sebutan *framework* Analisis Wacana Kritis (AWK) tiga dimensi Fairclough. Kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi tekstual, dimensi kewacanaan, dan dimensi praktis sosial.

Kaitannya dengan dimensi tekstual, Fairclough mengemukakan bahwa analisis teks merupakan analisis terhadap teks yang terdapat dalam wacana. Teks dinilai sebagai domain representasi dan signifikasi dunia dan pengalaman. Teks terbuka untuk berbagai interpretasi. Ada beberapa bentuk atau sifat teks yang dapat dianalisis dalam membongkar makna melalui dimensi tekstual, di antaranya adalah kohesi dan koherensi, tata bahasa, diksi. Fairclough mengemukakan bahwa inter-tekstualitas adalah sumber dari teks lain yang digunakan untuk membentuk teks baru, sedangkan interdiskursivitas adalah identifikasi atas jenis wacana/*genre/ style* dll. dari sebuah wacana.

Adapun kaitannya dengan dimensi kewacanaan, Fairclough mengemukakan bahwa analisis kewacanaan berfungsi untuk mengetahui proses produksi, penyebaran, dan penggunaan teks. Dengan demikian, ketiga tahapan tersebut mesti dilakukan dalam menganalisis dimensi kewacanaan (Fairclough, 1992a:65).

Selain itu, dengan dimensi praktis sosial, Fairclough mengemukakan bahwa analisis praktis sosial didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar teks mempengaruhi kelahiran sebuah teks/ wacana. Tiga level analisis *sociocultural practice* ini adalah level situasional, institusional, dan sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi bahasa yang digunakan oleh majalah *Al-wa'ie* untuk menggambarkan ideologinya dalam pemberitaan tentang Pro dan Kontra RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi dan kekonsistennya serta sasarannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini memberikan gambaran data secara akurat serta hubungannya dengan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, hasil yang diperoleh berupa analisis paparan data yang menggambarkan strategi berbahasa dalam pemberitaan. Wacana dalam kajian ini adalah artikel yang dimuat di majalah *Al-wa'ei*. Teks berita ini didapat dari majalah online *Al-wa'ei* tahun 2006-2008 dan bisa dilihat juga di situs www.hizbut-tahrir-.or.id. Tahap proses analisis ini adalah pengumpulan data, penyeleksian data, analisis dimensi mikro atau tekstual, analisis dimensi meso atau praktik wacana, analisis dimensi makro atau praktik sosial, pemaparan hasil analisis, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Tekstual (Analisis Mikro)

Dalam dimensi ini diuraikan secara mendetail teks yang akan dianalisis. Pemberitaan tentang pro dan kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang dimuat di majalah *Al-wa'ie* jika diuraikan secara linguistik mikro dalam salah satu artikelnya akan terlihat keberpihakan media tersebut. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa aspek.

Kohesi dan koherensi

Aspek ini direpresentasikan oleh repetisi yang digunakan dalam kutipan yang terdapat dalam teks berikut.

- (1) Pemberlakuan **RUU APP** akan memasung kreativitas.
- (2) Pemberlakuan **RUU APP** akan mematikan industri pariwisata.
- (3) **RUU APP** akan memberangus kebudayaan.
- (4) Pemberlakuan **RUU APP** tidak mendidik masyarakat,
- (5) **UU APP** adalah undang-undang yang mubazir.
- (6) **UU APP** mencerminkan tirani mayoritas atas minoritas.
- (7) **UU APP** akan memicu dis-integrasi (perpecahan) bangsa.
- (8) **UU APP** akan mendiskriminasi dan mengkriminalisasi perempuan.
- (9) Pemberlakuan **UU APP** berarti 'talibanisasi'.

Contoh (1) sampai dengan (9) menunjukkan adanya pengulangan kata (repetisi) dalam subjeknya. Kata RUU APP dan UU APP terus di ulang dalam teks tersebut. Unsur kohesi yang berupa pengulangan (*repetition*) menunjukkan adanya penekanan terhadap pelaku utama yang berbuat dan disoroti dalam pemberitaan.

Diksi (leksikal)

Pemakaian leksikal yang dipilih dalam pemberitaan artikel tersebut menunjukkan diksi yang bermakna positif dan negatif yang dapat menggambarkan representasi

pro dan kontra dengan adanya RUU APP ini. Perhatikan contoh berikut yang menyatakan pro terhadap RUU APP sebagai berikut:

- (10) “Aksi ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan para pelajar se-Jabodetabek. Kita minta DPR segera **mengesahkan** RUU APP,” ujar juru bicara aksi Ulluh Oktavianto, di Gedung DPR, Senayan, Jumat (2/6/2006).
- (11) Ketua DPR yang berada di tengah-tengah massa **menyatakan** terima kasih dan penghargaan kepada umat Islam yang **mendukung** pembahasan RUU APP. “Umat Islam telah **menyumbangkan** pikiran-pikiran yang jernih, objektif, dan **mencerminkan** nasionalisme,” kata Agung.
- (12) Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji (TGH) Safwan Hakim menegaskan, umat Islam sangat **membutuhkan** UU APP,...
- (13) Dai gaul asal Palembang Ahmad Abu Bakar Al Habsy dalam orasinya juga **menambahkan** dengan maraknya media porno **menghasilkan** gene-rasi penerus yang rusak akhlaknya, mereka lebih suka dengan baju minim, terjadinya pemerkosaan dan keja-hatan seksual lainnya ...
- (14) Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kalteng Drs H Ahmad Aini Baderi SH, **menghimbau** seluruh umat Islam melakukan sholat hajat seperti yang dilakukan organisasi yang dipimpinnya, mendoakan wakil rakyat di DPR RI agar terbuka hatinya segera mengesahkan RUU APP menjadi undang undang.
- (15) Sementara HM Istani Yunus yang mewakili Muhamadiyah Kalteng **mengatakan**, RUU APP diber-lakukan secara fleksibel untuk **meningkatkan** harkat dan martabat umat manusia dan bangsa.
- (16) Selain merusak moral, LDII juga **menilai** pornografi dan pornoaksi menciderai komitmen **membangun** moral bangsa. “Pornografi dan pornoaksi hanya **melahirkan** moral permissif,” tegas Hi-dayat.
- (17) Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Persis, Jeje Zaenudin **menegaskan**, yang terjadi di balik prokontra pengesahan RUU APP hanyalah perang ideologi.
- (18) Kegiatan itu diikuti utusan ormas Islam se-Cimahi dan warga masyarakat dengan tausiah dari Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), K.H. Athian Ali Dai. Ir. H. M. Itoc Tochija **mengatakan**, pihaknya **mendukung** pengesahan RUU APP. “Undang-undang itu berbicara akhlak manusia,” katanya.
- (19) PP Syarikat Islam (SI) melalui Gerakan Ulama dan Cendekiawan Syarikat Islam (GUCSI) juga **mendesak pengesahan** RUU APP dalam tablig akbar di Bumi Kitri Jln. Cikutra
- (20) ..., pesantren dan Partai Keadilan Sejahtera yang terga-bung dalam Gerakan Anti Maksiat (Geram) **melakukan** aksi demo di depan pendopo, setelah *long march* keliling kota. Mereka menolak semua penerbitan dan penayangan berbau pornografi dan pornoaksi serta **mendesak** agar pemerintah segera **mengesahkan** RUU APP.
- (21) Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale, berjanji akan **mengakomodasi** aspirasi umat ini. Balkan **mengupayakan** agar DPR dapat **mengesahkan** RUU ini paling lambat pada bulan Juni.

- (22) Dengan berbagai atribut ormas Islam, seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), BKPRMI dan KAM-MI, massa **meneriakkan** yel-yel dukungan terhadap pengesahan RUU APP.
- (23) Ketua Majelis Mujahidin Indo-nesia, Bambang Edi, **menyatakan**, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 2001, telah **mengeluarkan** fatwa tentang por-nografi dan pornoaksi.

Sejumlah verba yang terdapat dalam contoh (10) sampai dengan (23) merupakan verba aktif dan bermakna positif yaitu: *mengesahkan, menyatakan, mendukung, menyumbangkan, mencerminkan, melahirkan, menambahkan, menghasilkan, mengimbau, mengatakan, meningkatkan, menilai, membangun, membutuhkan, melakukan dan menegaskan.*

Verba aktif dan bermakna positif yang terdapat dalam teks di atas menggambarkan keinginan masyarakat secara keseluruhan baik individu maupun lembaga atau organisasi yang setuju dan mendukung adanya RUU APP ini dan berharap segera disahkan RUU itu menjadi UU. Selain yang mendukung adanya RUU APP ini ada juga beberapa pihak yang kontra terhadap RUU APP.

Kutipan teks yang menyatakan representasi kontra terhadap RUU APP sebagai berikut :

- (24) "Bila RUU ini disahkan, maka akan **memasung** aktivitas budaya serta **mengancam** entitas Bhin-neka Tunggal Ika," kata Palguna.
- (25) Mantan Presiden RI (Gusdur), dengan tegas menyatakan **menolak** RUU tersebut dan bersedia untuk **menghapusnya** bila akhirnya disahkan. Pernyataan sikap ini, tentu saja melegakan Olga dan Rieke Diah Pitaloka, karena me-nurutnya, RUU APP tidak hanya **merugikan** perempuan saja, teta-pi juga kaum pria.
- (26) RUU Pornografi **melecehkan** kaum perempuan karena meman-dang mereka semata-mata sebagai makhluk yang membangkitkan naf-su seksual
- (27) RUU Pornografi berpeluang **memicu** disintegrasi bangsa. Ti-dak ada satupun suku di Indonesia yang mau direndahkan kebuda-yaannya sebagai kebudayaan porno (Solaris).
- (28) RUU APP bukan melarang pornografi, melainkan **membenci** tubuh manusia, **mendiskrimina-sikan** kaum perempuan (Aliansi mawar putih)
- (29) Sikap mereka sama dengan mantan presiden Megawati, serta mantan ketua umum Golkar Akbar Tanjung, yang menyatakan **penolakan** RUU APP di Bali.
- (30) Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Damai Sejahtera adalah dua fraksi DPR yang **tidak memberikan** dukungan ketika RUU itu dirumuskan oleh Panja.

Sebagian besar verba yang terdapat dalam kutipan teks diatas memiliki makna negatif diantaranya adalah *menolak, memasung, mengancam, menghapus, merugikan, melecehkan, memicu, membenci, mendis-kriminasikan dan tidak memberikan.* Semua verba negatif tersebut meng-gambarkan ada beberapa bagian masyarakat secara keseluruhan baik individu maupun lembaga atau organisasi

yang kontra dengan adanya RUU APP ini dengan membuat berbagai pernyataan atau alasan untuk tetap menolak diberlakukannya RUU APP.

Selain penjelasan diksi, menurut Fairclough (1992a:77), analisis leksikal terbagi menjadi metafora, kata kunci (*key word*) dan kata yang berlebihan (*over wording*). Dalam tulisan ini hanya akan dianalisis kata kunci di bidang politik dan keagamaan agar tergambar ideologi yang dilancarkan dalam media ini.

Kata kunci dalam bidang politik

Berikut beberapa contoh yang mengandung kata kunci dalam bidang politik.

- (31)kemunculan gagasan untuk memberlakukan **Rancangan Undang Undang** Anti Pornografi dan **Pornoaksi (RUU APP)** ternyata tidak lantas mendapat sambutan positif dari **masyarakat**.
- (32)tinggal diefektifkan saja **undang-undang** yang sudah ada seperti **KUHP dan UU Pers**.
- (33) Hanya saja, memang harus dipastikan bahwa **UU** yang baru ini memuat **materi-materi hukum** yang secara definitif jelas...
- (34) UU APP akan memicu disintegrasi (perpecahan) **bangsa**.
- (35) Sekalipun untuk itu **negara** harus menanggung konsekuensi berupa upaya penyadaran terus-menerus...

Berdasarkan data di atas dapat dirumuskan dalam teks dimuat di majalah *Al-wa'ie* merupakan bagian dari wacana bidang politik juga karena berkaitan dengan Rancangan UU, masyarakat, KUHP, UU Pers, bangsa dan negara dll.

Kata kunci keagamaan

Kata kunci di bidang keagamaan terdapat kurang lebih 23 istilah keagamaan dalam teks. Itu terlihat pada kutipan teks yang diantaranya sebagai berikut.

- (36) Sebaliknya, **budaya jahiliah** dan terbelakang yang tidak sesuai dengan ketinggian martabat manusia...
- (37) **Allah Swt** memerintahkan kaum wanita untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dengan kerudung/khi-mar (**QS an-Nur[24]:31**) dan jilbab atau pakaian sejenis abaya/gamis yang longgar dan tipis (**QS al-Ahzab[33]:59**) ketika mereka hendak ke luar rumah.
- (38) Sebab, **syariat Islam** justru untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. (**Lihat: QS al-Anbiya [21]:107**).
- (39) ...tuduhan miring terhadap penerapan syariat **Islam** dan sosok **negara Islam**.
- (40) ...materi dan paradigma yang mendasari penyusunan RUU APP faktanya sama sekali tidak mengakomodasi satu pun **hukum Islam**.

Data di atas memperlihatkan gambaran ideologi dalam media dan artikel yang dimuat. Terlihat jelas istilah Islam dan dalil dari ayat al Qur'an yang sangat tegas, sehingga dapat disimpulkan leksikal keagamaan digunakan sebagai strategi untuk mempengaruhi, menarik simpati masyarakat dan menanamkan pemahaman secara radikal (mengakar) kepada pembaca artikel ini.

Tata bahasa

Tiga hal dari analisis tata bahasa yang digariskan oleh Fairclough (1992:235) adalah ketransitifan, tema, dan modalitas. Dalam tulisan ini hanya akan dianalisis ketransitifan dan modalitas yang bersesuaian dengan fungsi ideasional bahasa dan interpersonal bahasa yang terdapat dalam kutipan teks baik yang mendukung RUU APP maupun yang menolak diberlakukannya RUU APP.

Ketransitifan yang terdapat dalam kutipan langsung yang mendukung RUU APP di antaranya terdapat pada data di bawah ini :

- (41) Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Persis, Jeje Zae-nudin **menegaskan**, yang terjadi di balik prokontra pengesahan RUU APP hanyalah perang ideologi.
- (42) **Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale**, berjanji akan **mengakomodasi** as-pirasi umat ini.
- (43) **Humas Persatuan Gereja Kab. Majalengka, Sabu-ngan Simatupang** juga **menyatakan** dukungannya terhadap disahkannya RUU APP.
- (44) **Ketua DPR** yang berada di tengah-tengah massa **menyatakan** terima kasih dan penghargaan kepada umat Islam yang **mendukung** pembahasan RUU APP. "Umat Islam telah **menyumbangkan** pikiran-pikiran yang jernih, objektif, dan **mencerminkan** nasionalisme," kata Agung.

Kutipan teks di atas *menunjukkan* Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Persis, Jeje Zaenudin, Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale, Humas Persatuan Gereja Kab. Majalengka, Sabungan Simatupang dan Ketua DPR sebagai pelaku dan menempatkan verba *menegaskan, mengakomodasi, menyatakan, mendukung, menyumbangkan, mencerminkan, dll.* Sebagai proses. Jadi kesimpulannya bahwa, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Persis, Jeje Zaenudin, Ketua Pansus RUU APP, Balkan Kaplale, Humas Persatuan Gereja Kab. Majalengka, Sabungan Simatupang dan Ketua DPR untuk siap sedia dan bertanggung jawab mewujudkan RUU APP menjadi UU.

Ketransitifan yang terdapat dalam kutipan langsung yang menolak RUU APP di antaranya terdapat pada data di bawah ini:

- (45) **Budayawan dan cendekiawan Bali menolak** Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang akan disahkan DPR.
- (46) "Bila **RUU ini** disahkan, maka akan **memasung** aktivitas budaya serta **mengancam** entitas Bhinneka Tunggal Ika," kata Palguna.
- (47) **RUU Pornografi melecehkan** kaum perempuan karena memandangi mereka semata-mata sebagai makhluk yang membangkitkan nafsu seksual.
- (48) **RUU Pornografi** berpeluang **memicu** disintegrasi bangsa. Tidak ada satupun suku di Indonesia yang mau direndahkan kebudayaannya sebagai kebudayaan porno

Berdasarkan kutipan teks kalimat di atas *Budayawan dan cendekiawan Bali, RUU ini, RUU Pornografi* sebagai pelaku dan menempatkan verba *menolak, mengancam, memasung, mengancam, melecehkan dan memicu, dll.* sebagai proses. Ini menunjukkan bahwa *Budayawan dan cendekiawan Bali, RUU ini,*

RUU Pornografi untuk siap menolak RUU APP karena aibat yang akan ditimbulkannya.

Modalitas

Penggunaan modalitas ditentukan derajat afinitas (daya tarik – menarik) pembicara dan afiliasi terhadap pernyataannya. Fokus utamanya adalah menilai level kuasa (a) hubungan sosial dalam wacana dan (b) soal kontrol realitas (Fairclough,1992:236). Dalam tulisan ini hanya akan dianalisis pemanfaatan modalitas *harus* saja. Contoh kutipan yang terdapat dalam teks adalah sebagai berikut :

- (49) ...adanya UU APP ini justru **harus** kita pahami sebagai pelengkap atau penguat UU yang sudah ada.
- (50) Hanya saja, memang **harus** dipastikan bahwa UU yang baru ini memuat materi - materi hukum yang secara defenitif jelas,...
- (51) **Seharusnya** ketika menyadari bahwa tubuh adalah keindahan yang diciptakan sang Pencipta maka **harus** dipahami juga bagaimana sang Pencipta mengatur tubuh manusia.
- (52) ...karena menganggap perempuan sebagai obyek yang **harus** diatur.
- (53)sekalipun untuk itu negara **harus** menanggung konsekuensi berupa upaya penyadaran terus-menerus dan menyediakan berbagai infrastruktur...

Berdasarkan teks ditemukan 12 buah modalitas *harus* lebih banyak dibandingkan penggunaan modalitas lainnya, dapat dirumuskan bahwa teks dalam artikel yang dimuat di majalah *Alwa'ie* tentang Pro dan Kontra Ruu Anti-Porno Grafi dan Porno Aksi tetap menyalurkan kuasanya. Modalitas *harus* menunjukkan ketegasan penulis dalam menyampaikan artikel tersebut dalam teks.

Dimensi Praktik wacana (level meso)

Proses Penghasil Wacana

Teks yang diambil dalam artikel yang dimuat di majalah *Al-wa'ie* ini, ditulis oleh Husnul Khotimah sebagai anggota Lajnah Fa'aliyah DPD HTI Jawa Barat dan beberapa anggota dan simpatisan. Meski ditulis oleh mereka, tidak dapat dipastikan murni mandiri dari dirinya sendiri, melainkan diusung oleh pemikiran HTI tergambar dari slogan dan ideologi yang disampaikan dalam artikel tentang Pro dan Kontra Ruu Anti-Porno Grafi dan Porno Aksi ini. *Al-wa'ie* menjadi media untuk anggota dan simpatisan dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya. Media ini diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Pemimpin Redaksi adalah Farid Wadjadi. Media ini tetap berharap dapat memberikan sumbangan berharga bagi penguat cita-cita umat Islam Indonesia yang merindukan kembalinya kehidupan dan kejayaan Islam dalam kehidupan mereka.

Majalah *Al-wa'ie* merupakan media dakwah dan politik yang secara resmi di terbitkan oleh Hizbu Tahrir Indonesia sejak kurang lebih 11 tahun lalu tepatnya tahun 2000. Penerbit majalah *Al-wa'ie* dimaksudkan sebagai salah satu sarana pelengkap bagi dakwah Hizbu Tahrir Indonesia di tanah air, HTI berharap sesuai dengan slogannya membangun kesadaran umat dapat menjadi salah satu penunjang dakwah untuk membangkitkan sekaligus menumbuh kembangkan

kesadaran Islam di tengah-tengah kaum muslimin, yang tentu sangat relevan dengan cita-cita dakwah Hizbu Tahrir khususnya di Indonesia untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam institusi khilafah Islamiyah yang menerapkan syari'at Islam secara total dalam semua aspek kehidupan.

Intertekstualitas

Fairclough, (1992:84-85; Idris, 2006:79) menyatakan analisis intertekstualitas ini direalisasikan dalam lima kaidah yang boleh berlaku, yaitu representasi wacana, perandaian, ironi, negasi dan metadiscourse. Penulis hanya akan membahas intertekstualitas pada ironi saja.

Strategi intertekstualitas ironi terdapat pada kutipan teks yakni, ***Ironisnya, dalam kasus UU APP ini, pengaitan rencana pemberlakuan undang-undang tersebut dengan isu talibanisasi sesungguhnya salah alamat.*** Pernyataan ini di gunakan untuk menyindir kepada pihak-pihak lain yang menolak RUU APP yang terjangkau Islam fobia. Sindiran ini dikemas dengan bahasa yang halus. Ini sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesopanan sehingga menarik simpati pembaca.

Interdiskursivitas

Fairclough, (1992:232; Idris, 2006:80) menyatakan objektif adalah mengenal pasti jenis-jenis wacana yang dimanfaatkan dalam penghasilan teks yang dikaji. Sesuai dengan judul dalam wacana ini, dapat dinyatakan bahwa wacana yang menjadi data penelitian ini merupakan wacana dengan *genre* utama adalah wacana politik yang diselipkan ideologi Islam. Jadi wacana politik ini berisi menyampaikan pemikiran dan ideologi kepada pembaca dalam bentuk tulisan agar menyadari bahwa adanya RUU APP akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama dan sesuai dengan aturan Islam.

Proses Penyebarannya

Majalah *Al-wa'ie* ini memposisikan diri sebagai media politik dan dakwah di samping sebagai media pencerahan Islam dalam rangka membangun kesadaran seluruh kaum muslim. Sebagai media politik, *Al-wa'ie* selalu berusaha menyoroti dan membahas seluruh urusan kaum muslimin baik bidang, politik (luar dan dalam negeri) pemerintahan, ekonomi (lokal dan global), pendidikan, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, media ini terdiri dari media cetak dan elektronik sehingga memudahkan penyebarannya baik dalam maupun luar negeri. Bagi pembaca yang tidak ingin ketinggalan berita karena tidak sempat baca atau beli majalahnya dapat dilihat dan di baca *online* ke situs www.hizbuz-tahrir.or.id.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa penyebaran majalah *Al-wa'ie* dalam media cetak maupun elektronik tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga luar negeri melalui jaringan internet. Berita yang disampaikan oleh media ini dalam bentuk berita tertulis dan teks dapat dibaca dan diunduh secara online.

Pengguna Wacana

Majalah *Al-wa'ie* sasarannya seluruh kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan tidak hanya anggota atau simpatisan HTI saja. Hal ini disebabkan karena majalah *Al-wa'ie* adalah majalah yang mengajak pembaca berpikir untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi di semua aspek kehidupan baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang disajikan dalam pemberitaannya secara faktual.

Dimensi Praktik Sosial (Level Makro)

Dekade 90-an tampaknya dapat dikatakan sebagai masa munculnya pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Dengan tumbangannya Orde Baru tahun 1998, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dihapuskan. Siapa saja yang ingin mendirikan usaha pers tidak perlu bersulit-sulit lagi mengurus perizinan dengan biaya tinggi. Karena menerbitkan media cetak relatif murah, menjamurlah media etak baru di Indonesia, termasuk tabloid yang memuat foto-foto sensual dan cerita “panas”. Majalah Tempo Edisi 20-26 Maret 2006 menyebutkan ada 16 tabloid sejenis di ibukota.

Dengan terbitnya UU No.40 tahun 1994, kebebasan pers terjamin. Dalam ayat 2, pasal 4 UU tersebut dinyatakan: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Kebebasan yang diberikan ini ternyata tidak disertai dengan penegakan hukum yang terkait dengan kesusilaan.

Sementara itu, dengan semakin banyaknya media cetak dan media elektronik baru, persaingan semakin ketat. Banyak yang terdorong ikut memanfaatkan “selera rendah” masyarakat untuk bertahan dalam persaingan. Ketika goyang “ngebor” Inul laku di satu televisi, televisi lain ikut membuat acara sejenis. Ketika majalah yang menampilkan foto sensual wanita laku dijual, majalah-majalah yang tadinya membatasi diri ikut-ikutan memperbanyak tampilan wanita sensual. Ketika pornoaksi yang dilakukan di lingkungan terbatas merupakan berita yang menjadi menarik untuk diekspos dan laku dijual, berlomba-lombalah media massa memberitakannya.

Perkembangan teknologi juga berkontribusi dalam penyedaran pornografi. Dengan semakin mudahnya biaya pengandaan VCD dan harga VCD player, semakin banyaklah masyarakat yang bisa mengkonsumsi blue film. Teknologi internet juga berperan signifikan dalam penyebaran pornografi. Melalui warung-warung internet lebih banyak orang bisa mengkonsumsi gambar-gambar porno atau mendapatkan informasi tentang aktivitas pornoaksi yang ingin mereka ketahui.

Di tengah keprihatinan akan merebaknya praktik pornografi-pornoaksi berikut segala dampaknya, kemunculan gagasan untuk memberlakukan Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) ternyata tidak lantas mendapat sambutan positif dari masyarakat. Di samping pernyataan dukungan, suara penolakan pun tak kalah banyak suara ke permukaan yang mencuat. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari yang tidak logis, pragmatis hingga alasan yang ideologis (menurut Husnul Khotimah Anggota Lajnah Fa'aliyah DPD HTI Jawa Barat).

Pro dan Kontra RUU Anti-Porno Grafi dan Porno Aksi ini sebenarnya dipicu oleh kenyataan bahwa mayoritas desakan terhadap pemberlakuan RUU APP datang dari umat Islam tapi yang minoritas menolak adanya RUU APP, padahal RUU APP dan revisinya ketika dicermati, sebenarnya sama sekali tidak mengakomodasi hukum-hukum yang berasal dari Islam. Adanya pemahaman bahwa Islam anti pornografi dan pornoaksi, hal itu tidak bisa dijadikan dalih bahwa UU APP adalah islamisasi, karena senyatanya agama samawi manapun menganggap pornografi dan pornoaksi sebagai perbuatan terkutuk. Kalaupun, misalnya, spirit dan materi UU APP ini memang mengadopsi hukum-hukum Islam secara utuh, juga tidak perlu muncul kekhawatiran akan terjadinya tirani-tirani Islam atas non-Islam. Sebab, syariat Islam justru untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan (Lihat: QS al-Anbiya [21]:107). Dengan demikian, alasan ini sebenarnya muncul bukan semata-mata untuk menolak UU APP, melainkan lebih merupakan upaya stigmatisasi untuk memojokkan Islam dan kaum muslim di tengah maraknya wacana mengembalikan sistem Islam dalam kehidupan.

Maraknya hal tersebut membuat pornografi dan pornoaksi dampaknya hanya merupakan salah satu bentuk kebobrokan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme sekular yang rusak, yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Karena itu, memberangusnya hanya mungkin diawali dengan mencampakkan sistem ini, dan menggantinya dengan sistem Islam yang diterapkan secara utuh dan menyeluruh. Artinya, pemberlakuan UU APP saja sebenarnya belum bisa menjamin penyelesaian persoalan pornografi dan pornoaksi.

Ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat tidak lepas dari sorotan media di Indonesia terutama majalah *Al-wa'ie* yang selalu tampil menyuarakan suara-suara islam di Indonesia maupun dunia. Terlihat jelas keberpihakan media ini terhadap perkembangan dan berita islam di berbagai belahan dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai masalah Pro dan Kontra Ruu Anti-Porno Grafi dan Porno Aksi dalam majalah *Al-wa'ie*, dapat ditarik beberapa simpulan yakni:

1. Majalah *Al-wa'ie* sebagai media Islam di Indonesia selalu konsisten memuat berita mengenai permasalahan umat dikarenakan ideologi yang dipakai ideologi Islam dan dalam menggambarkannya jelas karena selalu lebih banyak memakai nara sumber ulama HTI, simpatisan HTI dan ulama Islam dari komunitas lain tapi tidak begitu banyak . Selain itu, dalam menggambarkan ideologinya juga terlihat dari istilah islam yang dipakai dan cantuman ayat - ayat suci Al Qur'an.
2. Secara struktur teks, redaksi banyak menggunakan kalimat-kalimat aktif yang menonjolkan pelaku dan korban secara seimbang. Selain itu, juga digunakan repetisi sebagai penekanan. Diksi yang dipilih pun diksi yang mengandung unsur pertentangan dari pihak yang menolak RUU APP. Redaksi selalu menempatkan RUU APP di awal kalimat seolah-olah sebagai pelaku yang berbuat semena-mena dan pihak yang menolak menjadi penderita untuk menarik simpati pembaca.

3. Sebagai majalah yang mengusung visi misi sebagai salah satu media umat muslim, tampak sekali keberpihakan redaksi terhadap RUU APP.
4. Selain menggunakan media cetak, majalah *Al-wa'ie* juga hadir dengan media online sehingga semakin banyak orang yang bisa melihat dan membacanya baik di dalam maupun luar negeri.
5. Majalah *Al-wa'ie* sasarannya seluruh kaum muslim baik laki - laki maupun perempuan tidak hanya anggota atau simpatisan HTI saja. Hal ini disebabkan majalah *Al-wa'ie* adalah majalah yang mengajak kita berpikir untuk kita memahami situasi dan kondisi yang terjadi di semua aspek kehidupan baik didalam negeri maupun yang ada diluar negeri yang disajikan dalam pemberitaannya secara faktual.

Penelitian ini hanya mengkaji beberapa artikel yang di muat di majalah *Al-wa'ie* tentang Pro dan Kontra Ruu Anti-Porno Grafi dan Porno Aksi. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau dikaji semua artikel yang terkait dengan RUU APP yang di muat di majalah *Al-wa'ie*. Dengan demikian, akan ditemukan kajian menyeluruh tentang bahasa politik dan gambaran idologi yang di sampaikan dalam media ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London: Longman
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Sosial Change*. Cambridge: Polity Press
- Fairclough Norman. 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Sosial Research*. London: Routledge
- Majalah *Al-wa'ie* edisi 198 melalui situs www.hizbut-tahrir.or.id